

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

# Harus Berani Hadapi Kenyataan

## Catatan Dewan Menuju Transisi New Normal di Jakarta

JAKARTA-Pemerintah Pusat menyiapkan rencana dan skenario pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak, mengatakan pelonggaran kebijakan PSBB Jakarta menuju transisi new normal atau kenormalan baru harus menggunakan basis data. Menurut dia, kebijakan kenormalan baru bukan dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

"Harus dipikirkan adanya klausul untuk mengakhiri atau sunset clause dengan menggunakan data, bukan menggunakan tanggal atau jadwal yang sudah ditetapkan," kata Gilbert di Jakarta, Senin, 1 Juni 2020. Dikatakan, pembatasan sosial merupakan tindakan ad hoc dan darurat untuk mengatasi wabah Covid-19 di suatu wilayah. Sedangkan untuk menerapkan tatanan kehidupan normal baru, kata dia, sebaiknya berbasis data evaluasi setiap fase dengan menggunakan data per dua pekan.

Mantan Wakil Ketua Regional South East Asia Regional Office International Agency for Prevention of Blindness WHO ini menuturkan ada beberapa negara yang sudah melonggarkan kebijakan pembatasan sosial maupun karantina wilayah. Mereka mengacu



Disarankan melihat data bahwa masyarakat menengah dan atas, usia 50 tahun lebih, pria dan ada penyakit penyerta darah tinggi dan diabetes merupakan faktor risiko."

**Gilbert Simanjuntak**  
Anggota Fraksi PDIP DPRD  
DKI Jakarta

kepada evaluasi kebijakan setiap fase per dua hingga tiga pekan.

"Disarankan melihat data bahwa masyarakat menengah dan atas, usia 50 tahun lebih, pria dan ada penyakit penyerta darah tinggi dan diabetes merupakan faktor risiko," ujar Gilbert. Selain itu, pembukaan lokasi perbelanjaan seperti mal, restoran dan tempat lainnya untuk kelompok rentan tersebut sebaiknya dilakukan setelah ada fase awal di tempat lain, seperti rumah ibadah dan tempat pariwisata. "Kita harus berani hidup menghadapi kenyataan," tutur dia.

### Tumbuhkan Ekonomi

Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan New Normal saat pandemi virus corona atau Covid-19. Harapannya, masyarakat akan kembali melakukan kegiatan seperti biasa dan tetap mengedepankan protokol

kesehatan pencegahan virus Corona dan perekonomian kembali tumbuh.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, ada tiga indikator yang dapat menentukan Jakarta bisa menerapkan New Normal. Indikator tersebut mengacu pada penjelasan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 21 Mei 2020.

Mujiyono menjelaskan, untuk indikator pertama adalah angka reproduksi virus Covid-19 atau Rt harus di bawah poin 1. Sementara pada 18 Mei 2020 Jakarta berada di posisi 0,98783. Meski dari indikator pertama telah terpenuhi New Normal, namun DKI diminta benar-benar transparan dan akurat dalam mengukur di lapangan.

Termasuk menjelaskan metode perolehan data, data, alat ukurnya dan sebagainya, sehingga data dapat diterima serta dipertanggungjawabkan secara ilmiah. "Apalagi, tim dari

Bulan:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

# Harus Berani Hadapi Kenyataan

Eijkman Oxford Clinical Research Unit (EOCRU) di laman berita The Conversation, menjelaskan bahwa Indonesia masih belum memiliki kurva harian epidemiologis pandemi Covid-19," kata Mujiyono. Menurutnya DKI Jakarta merupakan daerah yang memiliki rasio tempat tidur per penduduk yang lebih tinggi dibanding provinsi lain yakni sebesar 2,33 tempat tidur per 1.000 penduduk

Sebagai perbandingan, rasio tempat tidur per 1000 penduduk untuk Provinsi Jawa Barat sebesar 0,85; dan Jawa Tengah 1.15. Namun, DKI Jakarta dianggap perlu memperbesar lagi kapasitas sistem kesehatan ini, terutama terkait dengan ruang ICU, perlengkapan dan peralatan medis (Ventilator, APD, dan sebagainya), serta tenaga medis.

"Saya sarankan agar pemda melakukan refocusing anggaran untuk meningkatkan kapasitas sistem kesehatan ini, dengan target menambah tempat tidur rumah sakit untuk mencapai rasio di atas 3,5 per 1.000 penduduk," ucapnya.

Untuk mewujudkan indikator kedua, kata Mujiyono, DKI Jakarta juga perlu mempertimbangkan mendirikan rumah sakit dan fasilitas kesehatan darurat secara masif. Caranya, memanfaatkan aset-aset gedung/lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kemudian untuk indikator ketiga, kapasitas pengujian Covid-19. Sejak Maret -24 Mei 20202, Pemda DKI Jakarta telah memeriksa secara akumu-

latif 130.912 sampel dengan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid-19.

Artinya, rasio tes per 1 juta penduduk di DKI Jakarta adalah sebanyak 12.069. Ini akan makin bertambah besar. Alasannya, DKI membangun laboratorium satelit Covid-19 di RSUD Pasar Minggu yang sudah beroperasi sejak 9 April 2020, untuk meningkatkan kapasitas pemeriksaan metode RT-PCR.

"Memang saat ini, DKI dapat dikatakan lebih banyak melakukan tes dibandingkan dengan provinsi lain," ucapnya. "Namun apabila dibandingkan dengan negara lain kita masih tertinggal seperti Singapura yang melaksanakan tes per sebanyak 50.364 orang, Korea Selatan 16.375; dan Malaysia sebanyak 15.822," katanya.

"Karena itu diperlukan peningkatan tes PCR secara masif untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya," katanya. Dalam kesempatan Mujiyono juga meminta pemerintah untuk meningkatkan pelacakan kontak (contact tracing) terhadap pasien yang positif Covid-19.

Pemprov DKI Jakarta juga harus meriis informasi mengenai riwayat kontak yang dilakukan oleh pasien positif Covid-19, sehingga masyarakat dapat memeriksakan diri apabila melakukan kontak dengan pasien tersebut.

## Jadi Multikrisis

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan dampak ekonomi dari wabah virus Corona (Covid-19) mulai terasa di pemerintahan-

nya. Padahal saat ini, Jakarta sudah menunjukkan tanda-tanda wabah melandai dengan berbagai upaya termasuk pembatasan kegiatan secara bersama-sama di semua bidang.

"Semula ini adalah krisis kesehatan umum, kini sudah mulai terasa sebagai krisis ekonomi. Kegiatan keagamaan terhenti. Kegiatan sosial terhenti. Kegiatan budaya terhenti. Dan tentu saja, kegiatan perekonomian juga terhenti. Pasar terganggu, perdagangan terganggu. Perindustrian terganggu. Kegiatan perekonomian informal juga banyak yang terhenti," ungkapnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjabarkan, pendapatan pajak Jakarta turun dari Rp50,17 triliun menjadi Rp22,5 triliun, tinggal 45 persen. Anggaran Jakarta turun dari Rp87,9 triliun menjadi Rp47,2triliun, atau tinggal 53 persen.

"Belum pernah di dalam sejarah Pemprov DKI Jakarta, kita mengalami penurunan pendapatan sebesar ini, yaitu lebih dari Rp40 triliun," ujarnya. Konsekuensinya, keputusan relokasi anggaran harus diambil, karena dalam kondisi pendapatan yang berkurang separuh, maka harus dilakukan relokasi, pengurangan anggaran di berbagai sektor belanja langsung dan belanja tidak langsung.

"Semua harus mengalami pemangkasan dan pemangkasannya drastis. Itu konsekuensinya, karena tidak ada pilihan," terangnya. (dni/ant)